

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dependensi**

Teori Ketergantungan atau dikenal teori dependensi adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut Negara Dunia Ketiga. Dependensi (ketergantungan) adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dari ekonomi negara–negara lain (Dos Santos, 1970:18). Teori ini menyimpulkan bahwa arah terbaik yang dipilih oleh negara berkembang yaitu dengan bergantung kepada negara maju dalam hal utang luar negeri (Devi, 2016:38).

Dijelaskan oleh Lubis, (2020:2420) Teori ketergantungan menjelaskan bahwa utang luar negeri dapat membantu pemerintah dalam upaya menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, karena pembiayaan belanja rutin dan belanja pembangunan yang cukup besar. Dapat disimpulkan bahwa kaitannya pada pembangunan nasional membutuhkan modal, modal tersebut adalah utang luar negeri yang didapatkan dari pinjaman negara lain. Semakin meningkatnya utang luar negeri Indonesia mengindikasikan Indonesia memiliki ketergantungan terhadap utang luar negeri.

#### **2.2 Keuangan Negara**

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Peraturan mengenai keuangan negara didasari oleh Undang Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1 yaitu. “ Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dapat disimpulkan bahwasannya tujuan

keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan pengelola keuangan negara bersifat transparan guna untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan negara merupakan segala hal yang menyangkut tentang kekayaan negara seperti aset, pemerintah dan apabila pengelolaan keuangan negara yang baik sangat penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan efisien.

### **2.3 Utang Luar Negeri**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dijelaskan bahwa: “Pinjaman luar negeri adalah setiap pembayaran melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu”.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan (No. 35/KMK.07/2003) sebagai berikut: “Pinjaman Luar Negeri Pemerintah, selanjutnya disebut Pinjaman Pemerintah adalah sumber pembiayaan negara dalam bentuk devisa, barang dan atau jasa yang diterima dari pemerintah negara asing, badan / lembaga negara asing, atau badan / lembaga keuangan internasional yang harus dibayar kembali dengan persyaratan yang telah disepakati, termasuk penjaminan pembayaran yang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran kembali dikemudian hari”.

Sedangkan definisi yang dijelaskan oleh Subagiyo & Budiman, (2020:83) “Utang merupakan uang yang telah dipinjam oleh orang lain dan mempunyai kewajiban yang telah kita terima harus di bayar. Utang negara merupakan salah satu bentuk pinjaman yang dilakukan pemerintah”. Utang negara ini juga dibedakan menjadi 2 utang luar negeri dan utang dalam negeri”.

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri merupakan bagian dari total utang suatu negara. Utang luar negeri biasanya diperoleh dari kreditor/investor luar negeri. Pemberi pinjaman biasanya dari Lembaga bank swasta asing,

pemerintah negara asing, dan Lembaga Lembaga keuangan internasional yaitu Bank Dunia (World Bank), IMF, ADB dan lainnya.” Penerima pinjaman luar negeri ini adalah Pemerintah , Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta lainnya. Untuk waktu pengembalian utang atau jatuh tempo biasanya bersifat jangka pendek dan jangka Panjang” (Arifin & Masri, 2021:44).

Utang luar negeri yang diberikan oleh negara lain (luar negeri) untuk meningkatkan modal dalam negeri yang merupakan faktor materil”. Berdasarkan aspek lain yaitu aspek formal, dalam menunjang pertumbuhan ekonomi adanya peningkatan investasi (Nugraha *et al.*, 2021:22).

“Pengerahan dana dari luar negeri merupakan salah satu pilihan dilakukan pemerintah dalam rangka melakukan pembangunan nasional, Tetapi dalam pelaksanaannya pengerahan dana luar negeri wajib dilakukan dengan baik agar tidak terjadinya defisit anggaran” (Ratag *et al.*, 2018:70).

Awalnya, pemerintah menggunakan utang luar negeri. Pemerintah menerima bentuk hibah pinjaman lunak dari negara lain dan lembaga-lembaga pinjaman, baik secara bilateral maupun multilateral, seiring berkembangnya perekonomian Indonesia, pinjaman luar negeri yang bersifat lunak semakin terbatas, kebijakan yang dilakukan pemerintah karena pinjaman lunak semakin terbatas yaitu pinjaman komersial dan obligasi dari kreditur swasta internasional. (Atmadja, 2000:88).

### **2.3.1 Jenis Utang Luar Negeri**

Dijelaskan oleh Tribroto (2001:50) “Jenis utang luar negeri berdasarkan 5 (lima) aspek yaitu pinjaman yang diterima, sumber dana pinjaman, jangka waktu pinjaman, status penerimaan pinjaman, dan persyaratan pinjaman, sebagai berikut

- a. Jenis utang berdasarkan bentuk pinjaman dibagi atas :
  1. Bantuan proyek, yaitu merupakan bantuan luar negeri yang digunakan untuk keperluan proyek pembangunan dengan cara memasukan barang modal, barang dan jasa.
  2. Bantuan teknik, yaitu merupakan pemberian bantuan tenaga-tenaga terampil atau ahli.
  3. Bantuan program, yaitu merupakan bantuan yang dimaksudkan untuk dana bagi tujuan-tujuan yang bersifat umum sehingga penerimanya bebas memilih penggunaannya sesuai pilihan.

- b. Jenis utang berdasarkan sumber dana pinjaman dibagi atas :
  1. Pinjaman dari lembaga internasional, yaitu merupakan pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional seperti *World Bank* dan *Asian Development Bank*, yang pada dasarnya adalah pinjaman yang bebunga ringan.
  2. Serta pinjaman dari negara-negara anggota IGGIO (*Intergovernmental Group on Indonesia*). Biasanya berupa pinjaman lunak.
- c. Jenis utang berdasarkan jangka waktu peminjaman, terbagi atas :
  1. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman dengan jangka waktu sampai dengan lima tahun.
  2. Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman dengan jangka waktu 5-15 tahun
  3. Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman dengan jangka waktu diatas 15 tahun
- d. Jenis utang berdasarkan status penerimaan pinjaman, dibagi atas:
  1. Pinjaman pemerintah, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah.
  2. Pinjaman swasta, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak swasta
- e. Jenis utang berdasarkan persyaratan pinjaman, dibagi atas:
  1. Pinjaman lunak, yaitu merupakan pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral maupun negara bilateral yang dananya berasal dari iuran anggota (untuk multilateral) atau dari anggaran negara yang bersangkutan (untuk bilateral) yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan.
  2. Pinjaman setengah lunak, yaitu pinjaman yang memiliki persyaratan pinjaman yang sebagian lunak dan sebagian lagi komersial.
  3. Pinjaman komersial yaitu pinjaman yang bersumber dari bank atau lembaga keuangan dengan persyaratan yang berlaku di pasar internasional pada umumnya.

### 2.3.2 Dampak Utang Luar Negeri

Seluruh tindakan ekonomi dan keputusan negara mengandung berbagai konsekuensi, seperti itu juga terhadap tindakan pemerintah dalam melakukan pinjaman luar negeri. Dalam jangka pendek pinjaman luar negeri dapat menutup defisit anggaran APBN, hal ini mampu membuat dampak positif jika defisit ini harus dilakukan dengan solusi mencetak uang baru, sehingga pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dengan modal yang banyak, tanpa mendapatkan efek inflasi yang tinggi, kemudian dengan meningkatnya pembangunan ekonomi dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan untuk

meningkatnya PDB (Atmadja, 2000:89). Meningkatnya PDB dengan begitu akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Pemerintah wajib berhati-hati terhadap utang luar negeri dan tidak boleh menarik pinjaman/utang di luar kemampuan pemerintah untuk membayar, karena akan berdampak pada batas aman indikator utang luar negeri Indonesia terjaga. Negara kreditor yang memberikan pinjaman ini juga berpeluang untuk mengendalikan Indonesia apabila utang tidak diatur dengan baik dan Indonesia sangat terlilit hutang” (Subagiyo & Budiman, 2020:92). Kemudian utang luar negeri pemerintah akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk digunakan dalam pembangunan. Cicilan utang luar negeri juga makin tahun makin memberatkan perekonomian nasional Indonesia sehingga dapat menimbulkan krisis ekonomi, selain itu juga dalam jangka waktu Panjang utang luar negeri dapat memberikan beberapa permasalahan yaitu dapat menyebabkan nilai tukar rupiah yang melemah, inflasi, dan mengakibatkan ketergantungan terhadap pinjaman/utang luar negeri.

#### **2.4 Produk Domestik Bruto (PDB)**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS,2010) “Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha dalam satu negara, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi”. Dengan demikian Produk Domestik Bruto merupakan pendapatan seluruh suatu wilayah dalam sektor-sektor ekonomi atau dikenal sebagai pendapatan nasional.

Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh total hasil produksi nasional yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat di suatu negara dalam periode waktu tertentu, umumnya dalam kurun waktu 1 tahun (Fauzina, 2014:3) . Pendapatan nasional lebih tinggi akan mengurangi utang luar negeri. “Semakin tinggi produk domestik bruto disuatu negara akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengurangi utang luar negeri “ (Devi, 2016:33). Terdapat

beberapa konsep yang digunakan dalam mengetahui pendapatan nasional suatu negara salah satunya adalah perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Dijelaskan oleh Mankiw (2000:18), Produk Domestik Bruto sebagai berikut:

Produk Domestik Bruto adalah statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat. Hal yang mendasarinya karena PDB mengukur dua hal pada saat bersamaan: total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. Alasan PDB dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan pengeluaran dikarenakan untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran .

PDB dibagi menjadi dua yaitu PDB nominal dan PDB riil. PDB nominal merupakan nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga, sedangkan PDB riil atau disebut dengan PDB atas dasar harga konstan karena mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukan pengaruh dari harga.

## **2.5 Pengeluaran Pemerintah**

Definisi Pengeluaran pemerintah atau yang sering disebut pengeluaran negara Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 10 Tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa “Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara”.

Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*) adalah kebijakan fiskal suatu tindakan negara dalam mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun, yang dapat dilihat dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pusat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Tujuan dari kebijakan ini adalah dalam rangka menjalankan program-program pemerintah guna mensejahterakan masyarakat. Sedangkan definisi lain Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara dan pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah (Wulandari, 2019:35).

Faktor menyebabkan signifikannya pengeluaran pemerintah terhadap utang luar negeri ialah kebiasaan pemerintah yang menginginkan dana cepat untuk pembangunan dan menutup pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Sehingga utang luar negeri menjadi alternatif dalam menutup pembiayaan” (Nugraha *et al.*, 2021:24).

Akumulasi Utang Luar Negeri dan bunga asing yang akan dibayarkan melalui rencana Belanja Negara Indonesia (APBN RI) dalam porsi setiap tahun rencana pengeluaran.” Hal ini mengakibatkan kurangnya kesejahteraan rakyat di kemudian hari, yang akan menyusahkan masyarakat di Indonesia” (Farida & Yuliana, 2022:185).

Pengeluaran pemerintah, menurut organisasi pengeluaran pemerintah digolongkan menjadi 3 yaitu:

1. Pemerintah Pusat  
Pengeluaran pemerintah pusat terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi 2 yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan
2. Pemerintah Provinsi  
Pemerintah provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota  
APBD dalam Kabupaten/Kota digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja, bagi hasil pendapatan ke Desa/Kelurahan, Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri dari bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan, bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan, pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari, pembayaran Pokok Pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom lainnya

## **2.6 Defisit Anggaran**

Defisit Anggaran adalah anggaran dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. “Dimana penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Sejak tahun 2003 APBN sudah mengalami defisit, bahkan dapat

dikatakan tahun-tahun mulai orde lama, orde baru dan sampai pemerintahan sekarang saat ini kebijakan defisit sudah dijalankan dan sampai saat ini masih dipertahankan sebagai kebijakan anggaran” (Dilah *et al.*, 2018:213).

Secara akuntansi anggaran pemerintah terlihat bahwa penerimaan akan sama dengan pengeluaran, sehingga anggaran akan selalu terlihat dalam kondisi yang seimbang. Namun, pada realisasinya anggaran belanja pemerintah tidak selalu dalam keadaan seimbang, suatu kondisi APBN dimana saat belanjanya melebihi jumlah pendapatan disebut dengan defisit anggaran. Defisit anggaran adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Dijelaskan oleh Harahap, (2007:77) terdapat 4 (empat) pilihan cara untuk mengukur defisit anggaran, yaitu :

1. Defisit Konvensional, yaitu defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah.
2. Defisit Moneter, yaitu selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok utang) dengan total pendapatan (di luar penerimaan utang).
3. Defisit Operasional, yaitu merupakan defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal.
4. Defisit Primer adalah selisih antara belanja (di luar pembayaran pokok dan bunga utang) dengan total pendapatan.

Defisit anggaran tentunya diperlukan tambahan dana agar kegiatan yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan. Upaya untuk menutup defisit disebut sebagai pembiayaan defisit (*deficit financing*). Masalah utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah masih adanya defisit anggaran” (Ratag *et al.*, 2018:70).

Pemerintah berusaha menutup pembiayaan defisit anggaran dengan menggunakan utang luar negeri. Utang luar negeri merupakan bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan – badan internasional untuk memberikan pinjaman dengan kewajiban membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut (Pellu, 2019).

Saat keuangan negara dalam keadaan defisit, maka diperlukan tambahan dana agar kegiatan yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan. Tambahan



dana bisa berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Upaya dalam menutup defisit disebut sebagai pembiayaan defisit (*deficit financing*), upaya ini bisa berbentuk hutang, menjual aset milik negara dan memperoleh hibah.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang beberapa penelitian terdahulu. Beberapa hasil dari penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian kali ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ratag, Kalangi, Mandej, (2018)	Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Defisit Anggaran, dan Tingkat Kurs Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia (Periode Tahun 1996-2016)	Dependen: Utang Luar Negeri  Independen: Produk domestik bruto, Defisit anggaran, Tingkat kurs	Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  1. Produk domestik bruto mempunyai pengaruh positif terhadap utang luar negeri 2. Defisit anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap utang luar negeri 3. Tingkat kurs berpengaruh negatif terhadap utang luar negeri
2.	Saputra, Aimon, Roza, (2018)	Analisis faktor faktor yang mempengaruhi utang luar negeri di Indonesia	Dependen: Utang luar negeri  Independen: Pertumbuhan ekonomi, Suku bunga luar negeri, Inflasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri Suku bunga luar negeri

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap utang luar negeri 2. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap utang luar negeri
3.	Fadillah, Sutjipto, (2018)	Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Indonesia (2018)	Dependen: Utang Luar Negeri  Independen: Defisit anggaran, Nilai tukar, Utang luar negeri sebelumnya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Defisit Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Utang luar negeri 2. Nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap utang luar negeri 3. Utang Luar Negeri Sebelumnya sebelumnya menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri sebelumnya 4. LIBOR dan pembayaran utang luar negeri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap utang luar negeri 5. Pembayaran utang luar negeri tidak berpengaruh terhadap utang luar negeri
4.	Nugraha, Kamio, Gunawan, (2021)	Faktor Faktor Penyebab Utang Luar Negeri dan Dampaknya	Dependen: Utang Luar Negeri  Independen : Pertumbuhan	1. Pengeluaran Pemerintah mempunyai pengaruh signifikan dengan hubungan

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Faktor Faktor Penyebab Utang Luar Negeri dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Dependen: Utang Luar Negeri  Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran pemerintah, Nilai tukar, Pertumbuhan ekonomi negara peminjam	Yang positif 2. Nilai Tukar tidak berpengaruh secara positif terhadap utang luar negeri 3. Pengeluaran Pemerintah mempunyai pengaruh signifikan dengan hubungan yang positif 4. Nilai Tukar Tidak berpengaruh positif terhadap utang luar negeri
5.	Cahyaningrum, Nadzeva, Ramadhani, Nurdiansya (2022)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri di Indonesia 2015-2019	Dependen: Utang Luar Negeri  Independen: Ekspor, Produk Domestik Bruto (PDB), dan Nilai Kurs.	1. Ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Utang Luar Negeri 2. PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Utang Luar Negeri 3. Nilai Kurs berpengaruh signifikan terhadap Utang Luar Negeri
6.	Octavianti, Budyandra (2023)	Determinan Utang Luar Negeri Tahun 1981 – 2020	Dependen: Utang Luar Negeri,  Independen: Cadangan Devisa, Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar, Impor, Ekspor, Penanaman Modal Luar Negeri (PMLN)	1. PMLN, Cadangan devisa, nilai tukar berpengaruh parsial terhadap utang luar negeri 2. PDB, Impor, Ekspor menunjukkan hasil tidak berpengaruh parsial terhadap

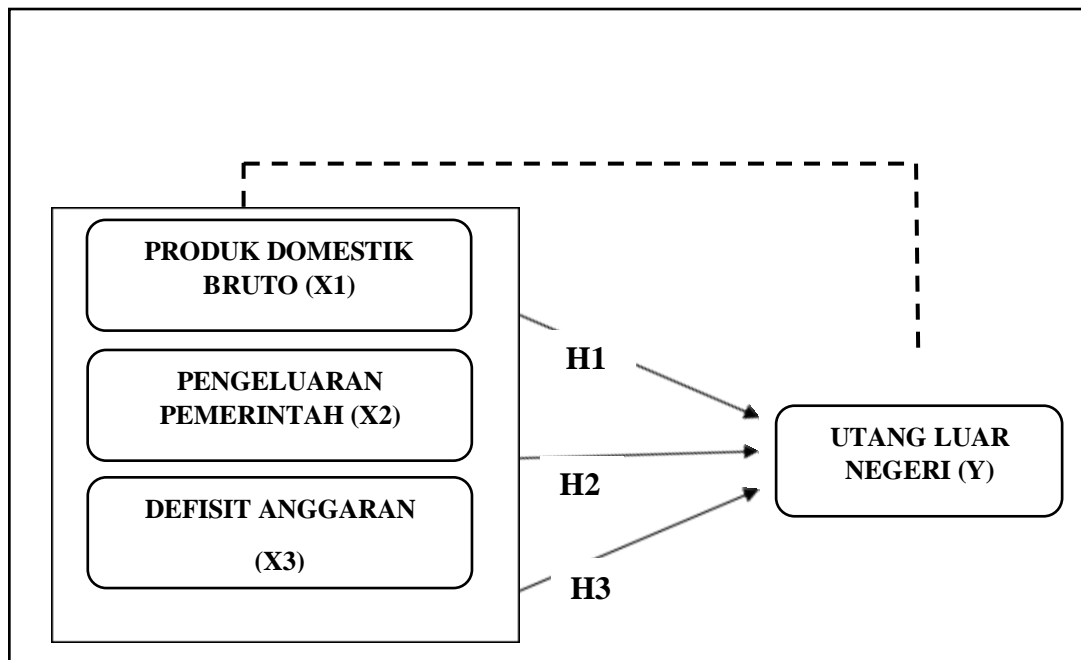
No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				Utang Luar Negeri
7.	Wulandari, Sugianto, Aminda, (2022)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri di Indonesia	Dependen: Utang Luar Negeri  Independen: Nilai Kurs, Ekspor, Impor, Pengeluaran Pemerintah	1. Nilai Kurs berpengaruh positif dan utang luar negeri 2. Ekspor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap utang luar negeri 3. Impor berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri 4. Pengeluaran negara tidak berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri
8.	Fauzi, Suhaidi (2022)	Pengaruh Defisit Anggaran, inflasi, dan nilai tukar terhadap utang luar negeri menurut perspektif islam	Dependen: Utang Luar Negeri  Independen Defisit anggaran, Inflasi, Nilai Kurs	1. Defisit Anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri 2. Inflasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap utang luar negeri 3. Nilai Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri
9	Ulfa, Zulhan (2017)	Analisis Utang Luar Negeri dan Pertumbuhan	Dependen: Utang Luar Negeri, Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. variabel Produk

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Ekonomi: Kajian Faktor- Faktor yang Mempengaruhi	Independen: Produk Domestik Bruto. Investasi	domestik bruto berpengaruh signifikan secara positif terhadap variabel utang luar negeri Indonesia 2. Variabel pertumbuhan ekonomi Indonesia memilik pengaruh langsung terhadap variabel investasi tetapi variabel investasi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia

*Sumber: diolah oleh peneliti (2023)*

## 2.8 Kerangka Pemikiran

“Kerangka penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting” Sugiyono (2018). Kerangka pemikiran teoritis dapat ditunjukkan oleh model gambar sebagai berikut:



Sumber: Data yang diolah, 2023

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

—————> : Pengaruh secara parsial

-----> : Pengaruh secara simultan

Y : Variabel Dependen

H<sub>1</sub> : Hipotesis 1

H<sub>2</sub> : Hipotesis 2

H<sub>3</sub> : Hipotesis 3

H<sub>4</sub> : Hipotesis 4

## **2.9 Hipotesis Penelitian**

### **2.9.1. Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Utang Luar Negeri**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) “Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha dalam satu negara, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi”. Dengan demikian Produk Domestik Bruto merupakan pendapatan seluruh suatu wilayah dalam sektor-sektor ekonomi atau dikenal sebagai pendapatan nasional.

Pendapatan nasional diukur oleh Produk Domestik Bruto. Semakin tinggi pendapatan nasional juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut tidak cukup dibiayai dengan modal sendiri, tetapi harus ditunjang dengan menggunakan bantuan modal asing” (Devi, 2016:33) .

Di Indonesia untuk melakukan pinjaman luar negeri/utang luar negeri terdapat aturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu pada pasal 23 ayat 1 “Pemerintah pusat dapat menerima dan memberikan hibah atau pinjaman dari pemerintah atau lembaga asing dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)” dan pada pasal 12 ayat (3) yaitu “Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB ). Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB”. Dapat disimpulkan bahwa jumlah utang luar negeri mempengaruhi PDB. Karena semakin besar PDB semakin besar juga pemerintah bisa menarik pinjaman luar negeri dengan tujuan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ratag *et al.*, (2022:76) variabel Produk Domestik Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia. Lain halnya dengan Octavianti & Budyanra, (2023:63) variabel Produk Domestik Bruto.

H1 : Produk domestik bruto berpengaruh terhadap utang luar negeri

### **2.9.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Utang Luar Negeri**

Definisi Pengeluaran pemerintah atau yang sering disebut pengeluaran negara Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 10 Tentang

Keuangan Negara menjelaskan bahwa “Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara”. Definisi lain yang dijelaskan oleh Wulandari, (2019:35) bahwa pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Faktor menyebabkan signifikannya pengeluaran pemerintah terhadap utang luar negeri ialah kebiasaan pemerintah yang menginginkan dana cepat untuk pembangunan dan menutup pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. sehingga utang luar negeri menjadi alternatif dalam menutup pembiayaan” (Nugraha *et al.*, 2021:24).

Akumulasi Utang Luar Negeri dan bunga asing yang akan dibayarkan melalui rencana Belanja Negara Indonesia (APBN RI) dalam porsi setiap tahun rencana pengeluaran.. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesejahteraan rakyat di kemudian hari (Farida & Yuliana, 2022:185).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Nugraha *et al.*, (2021:22) menunjukkan variabel pengeluaran pemerintah menunjukkan variabel ini mempunyai pengaruh yang signifikan dengan hubungan yang positif terhadap variabel utang luar negeri. Berbeda yang dilakukan oleh R. Wulandari *et al.*, (2022:57) menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri.

H2: Pengeluaran pemerintah terhadap utang luar negeri

### **2.9.3 Pengaruh Defisit Anggaran Terhadap Utang Luar Negeri**

Defisit Anggaran adalah anggaran dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Sehingga penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah.

Defisit anggaran tentunya diperlukan tambahan dana agar kegiatan yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan. Upaya untuk menutup defisit disebut sebagai pembiayaan defisit (*deficit financing*). Masalah utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah masih adanya defisit anggaran” (Ratag *et al.*, 2018:24).



Untuk menutup defisit anggaran dibutuhkan Utang luar negeri yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan – badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman dengan kewajiban membayar kembali dan membayar bunga pinjaman .

Menurut penelitian Dilah *et al.*, (2018:76) menunjukkan hasil bahwa variabel defisit anggaran berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi & Suhaidi, (2022:2177) menunjukkan hasil yang berbeda variabel defisit anggaran menunjukkan tidak berpengaruh signifikan dan tidak berpengaruh positif terhadap utang luar negeri

H3 : Defisit Anggaran berpengaruh terhadap utang luar negeri

#### **2.9.4 Pengaruh PDB, Pengeluaran Pemerintah, Defisit Anggaran Terhadap Utang Luar Negeri**

Peningkatan PDB terhadap Utang Luar Negeri searah, semakin tinggi PDB semakin banyak pemerintah untuk membangun infrastruktur. Hal ini membutuhkan modal yang harus dilakukan pemerintah solusinya ialah utang luar negeri jika terjadi penurunan PDB maka Utang luar negeri juga akan menurun dikarenakan menurut investor negara tidak mampu untuk membayar utang luar negeri tersebut dan nilai mata uang negara itu akan menurun.

Peningkatan pengeluaran pemerintah akan muncul nya defisit anggaran jika pengeluaran pemerintah lebih besar dari jumlah pendapatan, dan akan membutuhkan dana tambahan salah satunya utang luar negeri. Dengan begitu jika peningkatan pengeluaran pemerintah searah dengan peningkatan utang luar negeri sebaliknya jika pengeluaran pemerintah terjadi penurunan maka akan terjadi penurunan pada utang luar negeri.

Begitu juga dengan defisit anggaran, utang luar negeri akan meningkat jika defisit anggaran juga meningkat, sebaliknya jika defisit anggaran menurun utang luar negeri tersebut juga akan menurun. Berdasarkan teori di atas, maka hipotesis keempat pada penelitian ini adalah

H4: PDB, Pengeluaran Pemerintah, Defisit anggaran berpengaruh terhadap Utang Luar Negeri

